



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL

JL. Diponegoro No. 6 Telp. 0336441001, Tanggul 68155

KEPUTUSAN CAMAT TANGGUL

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/04/35.09.06/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TANGGUL

KABUPATEN JEMBER

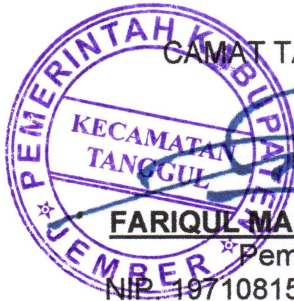
- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam:
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Tanggul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 3 Januari 2022


CAMAT TANGGUL
FARIQUL MASHUDI, S.Sos
Pembina
NIP. 19710815 199101 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER

Instansi	:	Kecamatan Tanggul
Tugas	:	a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
		b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
		c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
		d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
		e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
		f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
		g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
		h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
		i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
		j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi	:	a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
		b. Penanganan konflik sosial;
		c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
		d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
		e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
		f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
		g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
		h. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
		i. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset

		desa;
	j.	Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
	k.	Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
	l.	Pemberian fasilitasi Kerjasama antar desa dan Kerjasama desa dengan pihak ketiga;
	m.	Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
	n.	Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
	o.	Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
	p.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
	q.	Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
	r.	Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Tujuan	:	1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan Tanggul dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik;
		2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan & Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah di Wilayah Kecamatan Tanggul;
Indikator Tujuan	:	a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
		b. Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi Pemerintahan, Ketertiban & Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TANGGUL

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur	SKM Aparatur (survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)	$\frac{HASIL SKM}{TARGET SKM} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Umum	Survey aplikasi e-SUKMA
2	Meningkatkan efektifitas koordinasi antar lembaga dalam pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya koordinasi Muspika dan lintas sektoral	$\frac{JUMLAH PELAKSANAAN RAKOR}{JUMLAH TARGET RAKOR} \times 100\%$	Seksi Pemerintahan	Laporan dari Seksi Pemerintahan
3	Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan	Terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Administrasi dan Operasional Kecamatan}}{\text{Jumlah Target Pelayanan Administrasi dan Operasional Kecamatan}} \times 100\%$	Sekretariat Kecamatan	Register Sekretariat Kecamatan
4	Meningkatkan pelayanan non-perijinan kepada masyarakat	Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pelayanan Prima}}{\text{Jumlah Target Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Umum}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Umum	Laporan Seksi Pelayanan Umum

5	Meingkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesos <u>Jumlah koordinasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan kesos</u> X100%	Seksi PMKS	Laporan hasil Musrenbang dari Seksi PMKS
6	Meningkatkan koordinasi dalam ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada	Jumlah Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban <u>Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban</u> X100%	Seksi Trantib	Laporan dari Kegiatan Seksi Trantib
7.	Meningkatkan pembinaan sumber daya aparatur pemerintah desa dalam tata kelola Pemerintahan	Terlaksananya pembinaan sumber daya aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa Yang Mengikuti Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa <u>Jumlah Desa</u> X100%	Seksi Pemerintahan	Laporan Hasil Pembinaan dari Seksi Pemerintahan

